



EDITORIAL

154-169

MENGAJAI PERAN GREEN ADVERTISING DAN eWOM TERHADAP NIAT BELI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Surpiko Hapsoro Darpito, Yuli Liestyana, Karyono, Hery Sutanto, Lintang Nuril Shabrina

170-187

PENGARUH KONTEN VIDEO PENDEK BERBASIS AI DAN PENGALAMAN PELANGGAN TERHADAP NIAT MENONTON ULANG: PERAN MEDIATOR KEPUASAN PELANGGAN PADA GEN Z

Gadhing Dwi Nugrahanto dan Abdul Hadi Hari

188-206

TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN DAN FAKTOR PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Sri Ayem, Dara Ayu Melinda, Aidha Pradistha Kuncoro, Febrina Nor Wahidah, Eka Saputra Pratama

207-218

TRANSFORMASI KEUANGAN DI DAERAH : ANALISIS EFEKTIVITAS BRILINK DI KECAMATAN GUNUNG KERINCI

Bela Ovelia dan Wiyen Mailindra

219-232

PERAN WORK LIFE BALANCE DAN STRES KERJA DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL KARYAWAN PERUSAHAAN START-UP

Dodi Setiawan Riatmaja, Dinda Sukmaningrum, Ammar Surya Ramadhan

233-246

PENGARUH SALES PROMOTION DAN PERSONAL SELLING TERHADAP BRAND IMAGE DI TOKO KHENAR.ID

Salsabillah Lapasi, Hapsawati Taan, Djoko Lesmana Radji

247-260

WHAT DRIVES ENTREPRENEURIAL RESILIENCE IN BATIK SMES?

R. Andro Zyllo Nugraha, Agatha Saputri, Caesar Rosyad Achmadi, Muhammad Harfiansyah Makarim, Arief Nurrahman

261-282

Determinan Keberlanjutan Usaha Coffee Shop: Mediasi Keunggulan Kompetitif

Verga Aulia Putri dan Yuhendri L V

283-294

Peran Kepercayaan Merek dalam Hubungan Pemasaran dan Loyalitas Konsumen Fast Fashion

Tachaputri Ramadhana Anas, May Roni, Prasetya Nugeraha

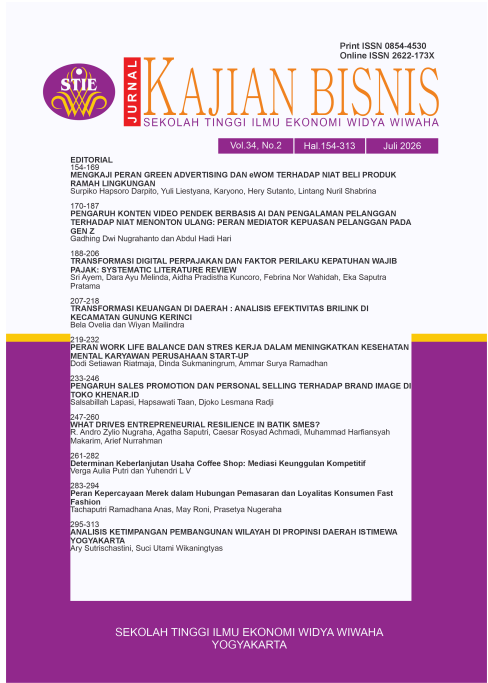
295-313

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ary Sutrischastini, Suci Utami Wikaningtyas

[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 34 No. 2 (2026): JURNAL KAJIAN BISNIS

Vol. 34 No. 2 (2026): JURNAL KAJIAN BISNIS



DOI: <https://doi.org/10.32477/aw6jhm26>

Published: 27-07-2026

Articles

MENGAJAI PERAN *GREEN ADVERTISING* DAN *eWOM* TERHADAP NIAT BELI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Surpiko Hapsoro Darpito, Yuli Liestyana, Karyono, Hery Sutanto, Lintang Nuril Shabrina

154-169



PENGARUH KONTEN VIDEO PENDEK BERBASIS AI DAN PENGALAMAN PELANGGAN TERHADAP NIAT MENONTON ULANG: PERAN MEDIATOR KEPUASAN PELANGGAN PADA GEN Z

Abdul Hadi, Gadhing Dwi Nugrahanto

170-187



TRANSFORMASI KEUANGAN DI DAERAH : ANALISIS EFEKTIVITAS BRILINK DI KECAMATAN GUNUNG KERINCI

Bela Ovelia, Wiyan Mailindra

207-218



PERAN WORK LIFE BALANCE DAN STRES KERJA DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL KARYAWAN PERUSAHAAN START-UP

Dodi Setiawan Riatmaja, Dinda Sukmaningrum, Ammar Surya Ramadhan

219-232



PENGARUH SALES PROMOTION DAN PERSONAL SELLING TERHADAP BRAND IMAGE DI TOKO KHENAR.ID

Salsabila Lapasi, Hapsawati Taan, Djoko Lesmana Radji

233-246



WHAT DRIVES ENTREPRENEURIAL RESILIENCE IN BATIK SMES?

R. Andro Zylío Nugraha, Agatha Saputri, Caesar Rosyad Achmadi, Muhammad Harfiansyah Makarim, Arief Nurrahman

247-260



Determinan Keberlanjutan Usaha Coffee Shop: Mediasi Keunggulan Kompetitif

Verga Aulia Putri, Yuhendri Leo Vrista

261-282



Peran Kepercayaan Merek dalam Hubungan Pemasaran dan Loyalitas Konsumen Fast Fashion

Tachaputri Ramadhana Anas, May Roni, Prasetya Nugeraha

283-294



ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ary Sutrischastini, Suci Utami Wikaningtyas

295-313



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2622-173X



pISSN 0854-4530



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



ACCREDITED SINTA 4



SK Akreditasi Sertifikat

Support By



VISITORS



JURNAL KAJIAN BISNIS

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI / 20, Sorosutan, Kota Yogyakarta, DIY 55162

Email: kajianbisnis@stieww.ac.id

JKB is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penulis

Ary Sutrischastini

STIE Widya Wiwaha

arisutrischastini@Gmail.com

Suci Utami Wikaningtyas

STIE Widya Wiwaha

suciotami@stieww.ac.id

Abstract

In regional economic studies, the issue of development inequality between regions is a significant topic of interest, including in the Special Region of Yogyakarta. According to data from the Central Statistics Agency (BPS) in March 2025, the Gini ratio in the Special Region of Yogyakarta was higher than the national average. This indicates a greater income gap in Yogyakarta. The objective of this study was to analyze regional development inequality and identify leading sectors with potential for development in the Special Region of Yogyakarta.

The research was conducted in the Special Region of Yogyakarta Province. The data sources were secondary data collected from the BPS for 2020–2024, including per capita GRDP and the population of the Special Region of Yogyakarta (DIY). The analysis tool used was the Williamson Index to measure regional development inequality and the Location Quotient (LQ) to determine leading or base sectors.

The results showed that regional development inequality in the Special Region of Yogyakarta Province was categorized as high, with an average Williamson Index value of 0.51658597. Meanwhile, the LQ analysis results showed that Yogyakarta City has ten basic sectors, followed by Gunung Kidul Regency with seven basic sectors, Bantul and Kulon Progo Regencies each with six basic sectors. Meanwhile, Sleman Regency has the fewest leading sectors, with five.

Keywords: *Development Inequality; Regional Development; Indeks Williamson; Gini Ratio; Location Quotient*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan upaya meningkatkan pembangunan yang seimbang dan merata guna terhindar dari ketimpangan antar wilayah. Menurut Setyanto dan Irawan (2016), istilah pembangunan wilayah dikaitkan dengan proses perubahan yang sifatnya multidimensional dan mencakup berbagai tindakan menuju pada terjadinya reorientasi dan reorganisasi terhadap sistem sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada keunikan wilayah atau didasarkan pada potensi wilayah agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Dalam realita hasil pembangunan seringkali tidak dapat dinikmati secara merata kepada masyarakatnya. Apabila pembangunan hanya terjadi di daerah tertentu saja, maka daerah itu saja yang mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan daerah yang tidak mengalami pembangunan, maka kesejahteraan masyarakat patut dipertanyakan (Kuncoro, 2004). Ketimpangan pembangunan didefinisikan sebagai ketidakmerataan pembagian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh suatu negara kepada penduduknya (Candrawati dan Nugroho, 2024). Ketimpangan pembangunan menunjukkan adanya perbedaan kesejahteraan antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat. Wilayah yang lebih maju

cenderung akan lebih sejahtera dibandingkan dengan wilayah yang tertinggal. Istilah wilayah secara umum diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang meliputi lahan, udara, air dan manusia yang saling berhubungan dan menguntungkan (Zofand dkk., 2023). Ketimpangan menunjukkan kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dengan miskin, sehingga memiliki keterkaitan yang kuat dengan persoalan kemiskinan (Asmanita, 2012).

Isu ketimpangan pembangunan ini menjadi isu yang cukup penting dan mendapat perhatian dalam kajian ekonomi regional, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalan pembangunan tidak hanya tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi termasuk pelaku ekonomi yang berperan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dihasilkan oleh sebagian besar penduduk, maka manfaat yang diperoleh akan dinikmati secara merata oleh penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dihasilkan oleh sekelompok kecil penduduk, maka hanya penduduk yang memberikan kontribusi itulah yang akan mendapat manfaat dan ini akan berakibat ketimpangan semakin tajam (Todaro & Smith, 2015).

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pembangunan khususnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini atau Rasio Gini. Semakin besar nilai Rasio Gini, maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi. Untuk mengetahui perkembangan Rasio Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Slleman	0,420	0,425	0,418	0,433	0,431
Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
Gunung Kidul	0,352	0,323	0,316	0,343	0,355
Kulon Progo	0,379	0,367	0,380	0,402	0,373
Kota	0,421	0,464	0,519	0,454	0,449
DIY	0,434	0,441	0,439	0,449	0,435
Indonesia	0,381	0,315	0,314	0,313	0,306

Sumber: BPS, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Rasio Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat. Selain itu Rasio Gini DIY memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Rasio Gini di tingkat nasional. Berarti pendapatan penduduk di DIY lebih timpang dibandingkan dengan tingkat nasional. Hal ini menjadi permasalahan bagi DIY karena hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh penduduknya. Apabila dilihat per kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 yang memiliki nilai Rasio Gini tertinggi berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai 0,449 dan yang paling rendah di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 0,355. Nilai yang terendah di Kabupaten Gunung Kidul ini bila dibandingkan dengan Rasio Gini di tingkat nasional (0,306) masih tergolong lebih tinggi sebesar 0,049.

Persoalan ketimpangan di DIY menjadi salah satu tantangan yang harus di atasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta pemerataan pembangunan antar daerah yang berkelanjutan (Zahara dkk., 2021). Ketimpangan yang bersifat spasial sulit untuk dihindari karena adanya distribusi spasial yang tidak merata dalam hal sumberdaya, aktivitas ekonomi dan fasilitas infrastruktur (Akita dan Miyata, 2018). Ketimpangan pembangunan dapat ditekan apabila sektor unggulan di setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Harini dkk., 2005; Sutrischastini, 2024). Tujuan Pembangunan akan tercapai apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik dengan kondisi dan potensi ekonomi daerah serta kemampuan memanfaatkan potensi daerah secara optimal (Najah dan Pandawa,

2024; Tolosang, 2017). Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah dan menentukan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterbaruan dalam tulisan ini adalah dalam penelitian tidak hanya dibahas untuk wilayah propinsi tetapi juga per kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui secara lebih detail bagaimana ketimpangan ditingkat kabupaten/kota di DIY. Harapannya hasil penelitian dapat memberi informasi wilayah kabupaten/kota yang memiliki ketimpangan yang tertinggi, agar kedepannya wilayah yang memiliki ketimpangan tertinggi mendapatkan perhatian yang lebih supaya ketimpangan pembangunan dapat dikurangi gapnya.

KERANGKA TEORI

Konsep Wilayah

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah didefinisikan sebagai kesatuan geografis dengan seluruh unsur terkait batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan Bintaro (1983) mendefinisikan wilayah sebagai ruang geografis yang berbeda baik secara fisik, budaya, ekonomi dan sosial.

Konsep wilayah seringkali dipergunakan sebagai landasan dalam persoalan geografi, ekonomi regional dan perencanaan pembangunan. Seiring dengan perkembangan atau perubahan kehidupan manusia, dalam konteks perencanaan pembangunan istilah wilayah tidak hanya dipandang sebagai ruang geografis saja tetapi lebih ke arah yang lebih dinamis.

Menurut Haggett (2001) wilayah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Wilayah formal, yaitu suatu wilayah yang ditandai dengan adanya keseragaman karakteristik tertentu misalnya budaya, topografi dan iklim.
2. Wilayah fungsional, yaitu suatu wilayah yang dibentuk dengan didasarkan hubungan dan interaksi antarwilayah misalnya karena adanya kegiatan ekonomi.

Sedangkan Glasson (1990) menambahkan satu lagi yaitu wilayah perencanaan merupakan wilayah yang dibentuk secara administratif untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan. Istilah wilayah bila dilihat dari konteks ekonomi regional merupakan tempat berlangsungnya aktivitas baik produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ini akan mendorong antar wilayah dan sektor saling berhubungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Richardson, 1973).

Konsep wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai tetapi juga kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi ada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Putra, 2018).

Ada tigakomponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara (Todaro & Smith, 2011). Ketiga faktor tersebut adalah: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya di buat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu ke waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Tarigan, 2014) .

Suatu wilayah akan memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menyikapi dampak dari fenomena globalisasi. Hal ini akan mempengaruhi posisi tawar masing-masing wilayah dalam berkompetisi. Kemampuan wilayah dalam meningkatkan daya saingnya sebagai penentu keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut (Kuncoro, 2009). Pada dasarnya pengembangan wilayah merupakan program yang bersifat menyeluruh dan terpadu dari semua aktivitas, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusinya terhadap pembangunan suatu wilayah.

Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang terjadi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi termasuk mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi regional, Pembangunan wilayah seringkali dikaitkan dengan teori pertumbuhan wilayah yang sering dikenal dengan teori basis ekonomi. Dalam teori ini menyatakan bahwa sektor unggulan sangat memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah karena memiliki kemampuan untuk menarik aliran pendapatan dari luar wilayah dan mendorong munculnya kegiatan ekonomi lain di wilayah tersebut (Richardson, 1978).

Ada beberapa faktor yang menentukan terhadap keberhasilan pembangunan wilayah yaitu kebijakan publik yang responsif, kapasitas kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan (Kuncoro, 2010). Tata kelola yang baik (*good Governance*) dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam membangun wilayah. Faktor lain yang mempengaruhi pembangunan wilayah adalah konektivitas antar wilayah yaitu antar wilayah harus saling berinteraksi baik melalui kegiatan perdagangan, transportasi dan arus tenaga kerja. Konektivitas ini menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya saing baik ditingkat nasional maupun internasional (Tarigan, 2012).

Ketimpangan wilayah

Ketimpangan wilayah didefinisikan sebagai keadaan dimana dalam suatu negara atau daerah terdapat perbedaan antar wilayah terkait tingkat pembangunan, kesejahteraan dan pendapatan. Timbulnya ketimpangan wilayah ini sebagai akibat suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sedangkan wilayah yang lain tertinggal (Todaro & Smith, 2015).

Menurut Perroux (1955), dalam teori pusat pertumbuhan dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di semua wilayah secara bersamaan, tetapi di wilayah tertentu dengan kecepatan yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi akan terkonsentrasi pada sektor yang memiliki keunggulan atau intensitas tinggi. Pusat pertumbuhan akan menciptakan efek pengganda yang mendorong kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Suatu wilayah mengalami perkembangan yang rendah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (Mawardi, 2007)

1. Daerah belum menetapkan komoditas unggulan yang benar-benar memiliki potensi untuk dikembangkan dan bernilai strategis
2. Pemerintah tidak fokus pada komoditas unggulan, karena semua komoditas dianggap potensial

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengurangi ketimpangan wilayah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah antarlain dengan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan ekonomi lokal dan menciptakan pusat pertumbuhan diluar wilayah yang sudah maju (BAPPENAS, 2020).

Menurut Sjahrizal (2014), penyebab utama timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah tidak proporsionalnya alokasi anggaran dan proyek pembangunan. Ini terjadi karena kebijakan Pembangunan lebih diprioritaskan pada wilayah tertentu misalnya wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Sedangkan Krugman (1991) penyebab ketimpangan pembangunan karena letak geografis yang mempengaruhi distribusi barang dan jasa, mobilitas factor produksi dan akses terhadap pasar. Kondisi ini dapat berdampak pada biaya transportasi karena wilayah yang terisolasi atau terpencil. Dalam teori New Economic Geography dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi cenderung teraglomerasi di wilayah yang memiliki akses pasar besar dan rendah biaya transportasi.

Kuznet (1966) penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan struktur ekonomi wilayah. Wilayah yang struktur ekonomi didominasi oleh pertanian tradisional biasanya akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan wilayah yang didominasi oleh sektor industri dan jasa modern. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pembangunan sering terjadi pada saat terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke industri.

Penyebab lain timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan produktivitas antar wilayah (Romer, 1990). Daerah yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik dan mampu menarik investasi. Keadaan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut meningkat lebih pesat.

Ketimpangan Pembangunan antar wilayah juga dapat disebabkan karena perbedaan kapasitas kelembagaan dan tata Kelola pemerintahan daerah (North, 1990). Suatu daerah dengan birokrasi yang efisien, transparan dan akuntabel akan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indeks Wiliamson

Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965 memperkenalkan Indeks Williamson dalam tulisannya yang berjudul *Regional Inequality and The Process of National Development*. Indeks Williamson adalah ukuran ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dengan memadukan antara pendapatan per kapita atau PDRB per kapita dengan jumlah penduduk setiap wilayah sebagai bobot. Jadi indeks ini dipergunakan sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan per kapita antar wilayah dan bagaimana ketimpangan berubah selama proses pembangunan ekonomi. Tujuan penggunaan Indeks Williamson adalah untuk memahami ketimpangan wilayah dalam konteks pembangunan nasional di negara-negara maju dan berkembang. Indeks Williamson memberi gambaran yang lebih realistis berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah dengan mempertimbangkan jumlah populasi suatu wilayah.

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sum_{i=1}^n f_i \left| \frac{Y_i - \bar{Y}}{\bar{Y}} \right|}{2}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita wilayah i

f_i = Proporsi populasi wilayah i terhadap total populasi

n = Jumlah wilayah yang dianalisis

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB per kapita seluruh wilayah

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai 1 dimana:

IW mendekati 0, berarti ketimpangan rendah; pemerataan pembangunan relatif tinggi

IW mendekati 1, berarti ketimpangan tinggi, pembangunan antar wilayah tidak merata

Di Indonesia indeks Williamson banyak diterapkan dalam persoalan yang menyangkut ketimpangan antar provinsi, kabupaten/kota, serta kawasan pedesaan dan perkotaan. Indeks ini menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi keberhasilan pembangunan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia.

Menurut Todaro & Smith (2015), penyebab tingginya nilai Indeks Williamson karena terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan yang terpusat. Perbedaan sumber daya manusia terjadi karena ada perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan dan ketrampilan, sehingga mempengaruhi daya saing wilayah. Sedangkan Sjafrizal (2014) berpendapat bahwa penyebab utama tingginya nilai Indeks Williamson karena terdapat ketimpangan aksesibilitas dan infrastruktur. Wilayah yang memiliki infrastruktur yang lebih lengkap akan menarik bagi investor, dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Wilayah yang memiliki sektor industri dan sektor jasa modern akan memiliki pendapatan dan produktivitas lebih tinggi dibandingkan wilayah yang mengandalkan pada sektor primer (Arsyad, 2016). Dampak yang ditimbulkan akibat nilai Indeks Williamson yang tinggi yaitu resiko ketidakstabilan sosial, politik, meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan relatif.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu metode yang dilakukan dengan membandingkan proporsi suatu sektor terhadap total perekonomian wilayah dengan proporsi sektor yang sama terhadap perekonomian wilayah referensi yang berskala nasional atau provinsi. Metode ini banyak diterapkan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis dalam suatu

wilayah. Suatu sektor dikatakan sebagai sektor basis apabila menghasilkan barang dan jasa yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri tetapi juga pasar di luar wilayah (Glasson, 1990). Sektor ini memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Sektor basis memiliki peran sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan suatu sektor dikatakan non basis apabila memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$). Sedangkan untuk LQ yang memiliki nilai sama dengan 1 ($LQ = 1$) menunjukkan sektor tersebut memiliki peran yang sama dengan wilayah perbandingan (Sjafrizal, 2012). Analisis LQ sangat membantu dalam perencanaan pembangunan wilayah khususnya untuk menentukan sektor unggulan suatu wilayah, mendorong investasi dan meningkatkan daya saing daerah.

Keunggulan dari LQ antarlain: (Tarigan, 2014)

1. Metode ini mampu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan secara cepat dan objektif. Dari hasil perhitungan LQ pemerintah dapat merancang pembangunan dengan lebih terarah terutama terhadap sektor-sektor yang memiliki keunggulan, daya saing dan kemampuan ekspor antarwilayah.
2. Metode ini dapat digunakan sebagai *screening tool*/alat awal dalam menganalisis ekonomi wilayah.
3. Metode LQ memiliki model yang sederhana dan mudah diterapkan. Metode inihanya memerlukan data PDRB atau tenaga kerja menurut sektor. Metode ini banyak dipergunakan karena di daerah-daerah seringkali menghadapi keterbatasan data dan sumberdaya manusia.

Kelemahan Analisis LQ antarlain yaitu: (Tarigan, 2014)

1. Penggunaan analisis LQ perlu dilengkapi analisis lain karena analisis LQ bersifat statis, tidak menunjukkan tingkat produktivitas atau keterkaitan antar sektor dan hanya menggambarkan struktur ekonomu pada satu periode tertentu (Isard, 1960).
2. Analisis LQ tidak memperhitungkan efisiensi, produktivitas dan kualitas output sektor. Hasil LQ yang tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang baik dan berdaya saing tinggi karena sektor tersebut kurang efisien dan menghadapi permintaan yang menurun. Ini terjadi sektor tersebut besar secara structural.
3. Metode ini hanya focus pada perbandingan proporsi sektor tanpa mempertimbangkan hubungan input output antara sektor satu dengan yang lainnya, sehingga berakibat pada sektor yang memiliki peran strategis tidak teridentifikasi sebagai sektor basis atau unggulan. LQ cenderung mengabaikan keterkaitan antar sektor
4. Pemilihan wilayah referensi harus dilakukan secara teliti sesuai tujuan analisis. Perbedaan wilayah perbandingan dapat emnghasilkan nilai LQ yang berbeda.

Penelitian Terdahulu

Sutrischastini (2020) dalam penelitiannya berjudul *Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekspor Di Kabupaten Gunung Kidul* memperoleh hasil bahwa di Kabupaten Gunung Kidul pada periode penelitian tahun 2013 sampai dengan 2019 terdapat sepuluh sektor dengan kategori sektor basis. Pendapatan yang tetap berada di Kabupaten ini sebesar 98,10 persen sedangkan sisanya 1,90 persen pendapatan berada di luar Kabupaten Gunung Kidul.

Di samping itu, Sutrischastini melakukan penelitian terkait kinerja setiap sektoryang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Hasil yang diperoleh kinerja setiap sektor mengalami penurunan pada periode penelitian dan berdampak pada penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sutrischastini, 2024).

Fahmi dan Maria (2023) melakukan penelitian di DIY untuk periode 2013-2020 dengan mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi menjadi tiga daerah yaitu kategori daerah maju dan cepat (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), daerah berkembang pesat (Kabupaten Kulon Progo) dan daerah relatif terbelakang (Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul). Di samping itu dengan Indeks Williamson ketimpangan pembangunan di DIY kategori tinggi berkisar 0,5-0,9. Ketimpangan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul berkisar antara 0,8-0,9, kategori rendah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berkisar antara 0,5-0,6.

Restiatun (2009) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan mengidentifikasi sektor unggulan dan analisis disparitas antara kabupaten/kota. Dengan menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Indeks Entropi diperoleh hasil adanya kecenderungan peningkatan disparitas dari waktu ke waktu dan daerah yang dikategorikan relatif terpencil adalah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sumber data

Data yang dipergunakan bersumber dari data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dibutuhkan yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan didasarkan pada harga konstan tahun 2010 untuk periode tahun 2020- 2024 dan jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.ary

Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Ketimpangan Pembangunan adalah ketimpangan atau disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kuncoro, 2004)
- b. PDB adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan pada periode waktu tertentu dalam suatu wilayah negara (Setyanto & Irawan, 2016)
- c. PDRB adalah seluruh nilai tambah yang dihasilkan pada periode waktu tertentu dalam suatu wilayah (Setyanto & Irawan, 2016)
- d. PDRB per kapita adalah nilai rata-rata Produk domestik bruto suatu wilayah provinsi atau kota per penduduk yang diperoleh dari PDRB total dibagi dengan jumlah penduduk (Setyanto & Irawan, 2016).
- e. Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah minimal satu tahun atau lebih, atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat untuk menetap selama minimal satu tahun (Setyanto & Irawan, 2016).

Metode Analisis

- a. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dirumuskan sebagai berikut: (Zofand kk, 2023)

$$W = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$$

Keterangan:

W = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota Yogyakarta

$\bar{y}$ = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

n = Jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota Yogyakarta

Indeks Williamson dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

$W < 0,35 \rightarrow$ Ketimpangan dikategorikan rendah

$0,35 < W < 0,50 \rightarrow$ ketimpangan dikategorikan menengah

$W > 0,50 \rightarrow$ Ketimpangan dikategorikan tinggi

- b. Untuk menentukan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan analisis *Location Quotient* (LQ) yang dirumuskan dengan (Asmanita, 2012; Candrawati & Nugroho, 2024)

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan:

LQ = Koefisien *Location Quotient*

E_{ij} = PDRB dari sektor-sektor pada kabupaten/kota ke j

E_j = PDRB di Kabupaten/kota ke j

E_{in} = PDRB Provinsi dari sektor i

E_n = PDRB provinsi

Apabila $LQ = 1$, berarti semua permintaan akan output dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah. Apabila $LQ > 1$, berarti sektor i mampu melakukan ekspor sehingga disebut sektor basis. Apabila $LQ < 1$, berarti daerah tersebut kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu apabila pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan, maka sektor ini disebut sektor non basis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan jumlah penduduk di Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Williamson pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Indeks Williamson Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Williamson
2020	0,51398092
2021	0,51969384
2022	0,51492043
2023	0,51615097
2024	0,51818369
Rata-rata	0,51658597

Sumber: Data Diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024 diperoleh hasil Indeks Williamson di atas 0,5 dengan rata-rata per tahun nilai Indeks Williamson sebesar 0,51658597. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan tinggi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja, sedangkan wilayah lain mengalami tertinggal. Sebagian kecil wilayah memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Penentuan Sektor Unggulan yang Berpotensi untuk Dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Dari tabel tersebut dapat diketahui ada lima sektor yang dikategorikan sebagai produk unggulan atau basis adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Perusahaan. Selain sektor tersebut, maka dikategorikan sebagai sektor non basis. Sektor basis memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 3 Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Sleman, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,77968	0,78021	0,79329	0,77379	0,79165
Pertambangan dan Penggalian	0,71971	0,70309	0,70305	0,68962	0,70346
Industri Pengolahan	1,01890	1,02515	1,02376	1,00020	1,00844
Pengadaan Listrik dan Gas	0,81596	0,81530	0,81654	0,80580	0,83250
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46718	0,46563	0,46548	0,45484	0,45938
Konstruksi	1,15596	1,15869	1,16800	1,17979	1,23237
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91480	0,91120	0,91546	0,89717	0,90169
Transportasi dan Pergudangan	0,93123	0,85048	0,81304	0,77970	0,79126
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,03522	1,04044	1,03479	1,01769	1,03446
Informasi dan Komunikasi	0,98929	0,99098	0,99365	0,97814	0,98979
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84741	0,85823	0,86172	0,84491	0,85729
Real Estate	1,15264	1,15197	1,15321	1,13160	0,47682
Jasa Perusahaan	1,68566	1,68186	1,68380	1,65214	1,66283
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,81207	0,81187	0,80968	0,79354	0,80553
Jasa Pendidikan	1,18749	1,18975	1,19267	1,16473	1,17539
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94862	0,94597	0,94177	0,92453	0,93006
Jasa Lainnya	0,86594	0,85766	0,88929	0,87207	0,87616

Sumber: Data Diolah.

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024. Pada tabel tersebut terdapat enam sektor yang termasuk sektor basis atau unggulan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Lainnya. Sedangkan selain enam sektor yang di sebutkan termasuk sektor non basis. Dari enam sektor basis nilai LQ yang paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertambangan dan penggalian, di mana secara rata-rata dari tahun 2020-2024 sebesar 3,00107.

Nilai yang sangat besar ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi yang lain, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah ikut terdorong lebih cepat.

Tabel 4 Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,72404	1,75038	1,67349	1,64029	1,68542
Pertambangan dan Penggalian	3,00205	3,06173	3,00902	3,03612	2,89829
Industri Pengolahan	0,93078	0,94745	0,93838	0,91691	0,94135
Pengadaan Listrik dan Gas	0,60457	0,61163	0,60193	0,58821	0,59842
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23593	1,24235	1,23792	1,20776	1,27968
Konstruksi	1,73271	1,64499	1,59691	1,56359	1,56857
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,57462	1,59285	1,59659	1,55503	1,60538
Transportasi dan Pergudangan	1,93168	2,09930	2,30732	2,42709	2,46549
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39825	0,41436	0,41107	0,39451	0,39583
informasi dan Komunikasi	0,51969	0,52879	0,52964	0,51709	0,52697
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,69852	0,70597	0,69774	0,68847	0,70705
Real Estate	0,47039	0,47579	0,46901	0,45581	0,46471
Jasa Perusahaan	0,30596	0,30892	0,30418	0,29645	0,30290
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,98006	0,97557	0,96192	0,93657	0,95229
Jasa Pendidikan	0,63055	0,63381	0,62657	0,60809	0,62077
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52748	0,53219	0,52792	0,51112	0,52416
Jasa Lainnya	1,32957	1,28396	1,25467	1,20898	1,23157

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Bantul dari tahun 2020-2024. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat enam sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Adapun keenam sektor tersebut yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Selain ke enam sektor yang telah disebutkan termasuk sektor non basis.

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Bantul, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,37584	1,38861	1,34111	1,31739	1,34997
Pertambangan dan Penggalian	0,98093	0,96230	0,96831	0,94405	0,89705
Industri Pengolahan	1,16110	1,17086	1,19105	1,17288	1,19426
Pengadaan Listrik dan Gas	1,04233	1,04523	1,04389	1,02475	1,03829
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,82298	0,82353	0,82917	0,81524	0,83315
Konstruksi	0,90501	0,91368	0,92122	0,90856	0,92383
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,03107	1,03220	1,03758	1,02098	1,04345
Transportasi dan Pergudangan	1,01803	1,04043	1,00863	0,96888	0,99038
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20565	1,20351	1,20659	1,18383	1,20116
Informasi dan Komunikasi	0,92907	0,92727	0,92996	0,91474	0,93067
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73897	0,74525	0,74895	0,74621	0,76547
Real Estate	0,93991	0,94058	0,94232	0,92769	0,94402
Jasa Perusahaan	0,47569	0,47676	0,47641	0,46906	0,47722
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,92179	0,92376	0,92666	0,91128	0,92635
Jasa Pendidikan	0,83116	0,83536	0,83443	0,82828	0,84039
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73218	0,73271	0,73681	0,724835	0,73774
Jasa Lainnya	0,85887	0,81538	0,79579	0,80497	0,82244

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan LQ di Kota Yogyakarta untuk tahun 2020-2024. Dari tabel tersebut terlihat bahwa yang termasuk sektor unggulan di Kota Yogyakarta ada 11 sektor untuk periode waktu dari tahun 2020-2022, tetapi pada tahun 2023 dan 2024 turun menjadi 10 sektor. Sektor yang tidak masuk pada sektor unggulan dari tahun 2023 dan 2024 adalah sektor Jasa Perusahaan. Adapun sepuluh sektor yang masih tergolong unggulan sampai tahun 2024 yaitu sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain kesebelas sektor yang sudah disebutkan dikategorikan sebagai sektor non basis. Kota Yogyakarta memiliki sektor basis yang lebih banyak dibandingkan dengan semua kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kota Yogyakarta, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01702	0,017037	0,01689	0,01699	0,01733
Pertambangan dan Penggalian	0,00614	0,00606	0,00611	0,00596	0,28584
Industri Pengolahan	1,01647	1,01774	1,02341	1,01078	1,02675
Pengadaan Listrik dan Gas	1,49715	1,50316	1,50296	1,47533	1,48686
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41879	1,42065	1,41312	1,37828	1,40351
Konstruksi	0,67547	0,66203	0,66133	0,62269	0,59945
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83043	0,83266	0,82581	0,81267	0,82342
Transportasi dan Pergudangan	0,76979	0,80156	0,79250	0,75709	0,77769
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16547	1,15154	1,17218	1,16172	1,18510
Informasi dan Komunikasi	1,27445	1,24311	1,24086	1,21480	1,23915
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67775	1,67379	1,66616	1,61946	1,64083
Real Estate	1,26881	1,27701	1,27338	1,25052	1,27147
Jasa Perusahaan	1,01068	1,01578	1,01587	0,98546	0,73792
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,20700	1,23247	1,23749	1,21792	1,50806
Jasa Pendidikan	1,12174	1,12056	1,12232	1,10471	1,11547
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48977	1,50255	1,50512	1,48085	1,50756
Jasa Lainnya	0,98309	0,94349	0,96720	0,95046	0,98089

Sumber: Data Diolah

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gunung Kidul untuk tahun 2020-2024. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tujuh sektor yang termasuk sektor basis, karena memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Adapun ketujuh sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Sektor Jasa Lainnya. Selain sektor yang sudah disebutkan dan memiliki nilai LQ kurang dari satu, maka termasuk sektor non basis.

Tabel 7. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Gunung Kidul, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50990	2,50648	2,49980	2,48934	2,51107
Pertambangan dan Penggalian	2,46212	2,52259	2,51739	2,48194	2,58292
Industri Pengolahan	0,73841	0,73896	0,74059	0,72773	0,74273
Pengadaan Listrik dan Gas	0,65641	0,65935	0,65613	0,64736	0,65934
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,60449	1,61052	1,60786	1,59444	1,66962
Konstruksi	0,93093	0,93260	0,94211	0,94174	0,95883
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,15331	1,16739	1,16675	1,14825	1,17944
Transportasi dan Pergudangan	1,04166	1,07783	1,04364	1,00221	1,03782
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67372	0,69672	0,67541	0,65549	0,67203
Informasi dan Komunikasi	0,88007	0,88405	0,88337	0,87483	0,91012
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,58058	0,58706	0,58611	0,58431	0,59968
Real Estate	0,50580	0,50678	0,50511	0,49772	0,50746
Jasa Perusahaan	0,44053	0,44168	0,44013	0,43325	0,44247
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18011	1,16456	1,15769	1,13839	1,15846
Jasa Pendidikan	0,75419	0,75787	0,75615	0,75042	0,76699
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81949	0,82094	0,82081	0,80722	0,82975
Jasa Lainnya	1,36048	1,33150	1,40328	1,43755	1,48739

Sumber: Data Diolah

PEMBAHASAN

Pembangunan sebagai proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju pada keadaan yang lebih baik. Pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk menghitung ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau provinsi adalah Indeks Williamson. Indeks ini memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Apabila nilai Indeks Williamson memiliki nilai mendekati 0, menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin kecil artinya pembangunan yang dilakukan semakin merata. Demikian sebaliknya apabila nilai Indeks Williamson memiliki nilai mendekati 1, berarti bahwa hasil pembangunan antar wilayah semakin timpang.

Dari hasil olah data diperoleh nilai Indeks Williamson di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, karena nilai rata-rata Indeks

Williamson sebesar 0,51658597. Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini mengindikasikan bahwa terdapat wilayah yang mengalami pembangunan yang cukup pesat dan di wilayah lain pembangunan lambat, sehingga pembangunan yang terjadi di wilayah DIY tidak merata.

Menurut Arsyad (2016), jika nilai Indeks Williamson lebih besar dari 0,5 berarti *efek trickle-down* belum berjalan dengan efektif. Efek *trickle down* adalah pembangunan yang terjadi di wilayah maju belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan wilayah tertinggal. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, memicu ketimpangan akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan kemiskinan relatif.

Makna nilai Indeks Williamson lebih besar dari 0,5 yaitu:

1. Terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan, misalnya wilayah perkotaan atau wilayah industri, sementara di wilayah yang lain tertinggal
2. Terjadi ketimpangan yang tinggi antar wilayah, sebagian kecil wilayah memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lain.
3. Akses terhadap infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan peluang kerjaya tidak seimbang, sehingga mendorong ketimpangan ekonomi dan sosial (Sjafrizal, 2014).

Location Quotient (LQ) merupakan metode yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di suatu wilayah. Sektor unggulan dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah karena sektor ini dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan di sektor lain. Dengan memberi perhatian yang besar terhadap sektor unggulan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat lebih pesat (Ambar dkk., 2021). Oleh karena itu, metode LQ dapat dipergunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sektor yang dapat dikembangkan guna meningkatkan daya saing wilayah. Jika suatu wilayah memiliki sektor dengan nilai $LQ > 1$, maka sektor ini dikategorikan sebagai sektor unggulan atau basis yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain yang tidak memiliki keunggulan. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan pembangunan wilayah karena pertumbuhan yang terjadi tidak merata (Tarigan, 2005; Arsyad, 2010). Dari hasil olah data diperoleh perhitungan nilai LQ kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta memiliki sektor unggulan paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan kabupaten lain. Kota Yogyakarta memiliki 10 sektor yang dikategorikan basis, sedangkan urutan kedua yaitu Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah tujuh sektor basis, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo sebanyak 6 sektor basis. Sedangkan Kabupaten Sleman memiliki sektor unggulan paling sedikit yaitu ada 5 sektor. Kondisi ini memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal karena sektor basis memiliki *multiplier effect* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang lainnya.

Dalam konteks ekonomi regional, Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan memiliki jumlah sektor unggulan paling banyak. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prabowo, 2023). Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan jasa, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tersedianya fasilitas infrastruktur, tenaga kerja yang berkualitas, akses pasar dan layanan publik yang lebih lengkap akan mendorong investor lebih tertarik di Kota Yogyakarta daripada kabupaten lain. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten lain yang lebih banyak tergantung pada sektor primer. Bila dilihat secara detail dari tahun 2020-2022 jumlah sektor basis sebanyak 11 sektor, tapi di tahun 2023 dan 2024 jumlah sektor basis menurun menjadi 10. Faktor yang menjadi penyebab antaralain adanya ketidakpastian ekonomi pasca pandemi, sehingga mempengaruhi kinerja sektor tertentu yang sensitif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan aktivitas ritel.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari nilai Indeks Williamson sebesar 0,51658597.
2. Dari hasil analisis LQ diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki sepuluh sektor basis, sedangkan urutan kedua yaitu Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah tujuh sektor basis, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo masing-masing sebanyak 6 sektor basis. Sedangkan Kabupaten Sleman memiliki sektor unggulan paling sedikit yaitu ada 5 sektor.

SARAN

1. Pendekatan secara holistik sangat diperlukan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di DIY melalui pembangunan infrastruktur, desentralisasi kebijakan yang lebih inklusif dan peningkatan sumber daya manusia serta penguatan sektor lokal.
2. Dalam melakukan pembangunan ekonomi hendaknya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan sektor basis. Ini dilakukan karena dengan berkembangnya di sektor basis akan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di sektor-sektor yang lain.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menggunakan Indeks Williamson. Untuk penelitian berikutnya perlu ditambahkan alat analisis lain seperti Indeks Jaime Bonet. Indeks Williamson secara umum hanya menjelaskan tren secara makro terkait ketimpangan wilayah DIY dari tahun ke tahun, sehingga perlu ditambah analisis Jaime Bonet untuk melihat secara spesifik wilayah yang menjadi pusat aglomerasi ekonomi yang mampu menarik kue pembangunan yang paling besar dibandingkan dengan wilayah lain di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Ambar, A., Walewangko, E. N. dan Tumangkeng S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019," *J. Berk. Ilmu Efisiensi*, vol. 21, no. 1.
- Asmanita. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Propinsi Sumatera Selatan Dan Bengkulu). *Jurnal Media Wahana Ekon.*, vol. Vol. 9 No., hal. 67–75. [Daring]. Tersedia pada: <file:///C:/Users/hp/Downloads/admin,+7.+Asmanita.pdf>.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Candrawati, C. dan Nugroho, Alih Aji (2024). Analisis Potensi dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Good Governance.*, vol. 20 No, hal. 143–159, [Daring]. Tersedia pada: <file:///C:/Users/hp/Downloads/5.+Cindy+Candrawati,+Alih+Aji+Nugroho.pdf>.
- Fahmi, N. dan Maria, N.S.B. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2020. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 12 No. 2, <https://doi.org/10.14710/djoe.37965>

- Glasson, J. (1990). *An Introduction to Regional Planning*. London: Routledge.
- Gluschenko, Konstantin. (2015). 'Williamson's Fallacy in Estimation of Inter-Regional Inequality. Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk State University. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) paper, No. 68019, Posted 23 Nov 2015 06:18 UTC. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68019/>
- Haggett, P. (2001). *Geography: A Global Synthesis*. London: Pearson Education.
- Harini, R., Giyarsih, S. R dan Budiani, S. R. (2005). Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 19 No. 1, Yogyakarta, hal. 1–20.
- Isard, W. (1960). *Methods of Regional Analysis*. Cambridge: MT Press.
- Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Revormasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, S. (1996). *Modern Economic Growth*. Yale University Press.
- Mawardi, Ikhwanudin. (2007). Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Konsep Produktifitas Unggulan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, Hal 181-187.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. *Économie Appliquée*, 8, pp. 307–320.
- Prabowo, D. (2023). Analysis Of The Leading Sector of Kota Pelajar with Location Quotient Method and Klassen Typology. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol. 24 No. 1, Hal 55-72. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2251>
- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Restiatun. (2009). Identifikasi sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan studi Pembangunan*, Vol. 10 No. 1, Hal 77-98.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98 (5).
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi aksara.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). In *Economic Development*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Richardson, H. W. (1973). *Regional Growth Theory*. London: Macmillan.
- Richardson, H. W. (1978). *Regional and Urban Economics*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Setyanto, A. dan Irawan, B. (2016). *Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional Dan Implementasinya Di Sektor Pertanian*, Ekoregion.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrischastini, A. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekspor Di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*. Vol. 14. No. 2. Hal. 101-109. DOI: <https://doi.org/10.53916/jeb.v14i2>
- Sutrischastini, A., Gusti, Y. K., Sofiati, Linawati, Firdarini, K. C. (2024). Penerapan Shift Share Arcelus Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi. dan Bisnis Indonesia*. STIE Widya Wiwaha, vol. Vol. 4 No., hal. 959–972. Tersedia pada: <https://drive.google.com/file/d/1TQun2UAj7kklu7k5ZBDj6JCfMF9g-XXi/view>.
- Wibowo, K. (2003). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Kerangka Teoritis dan Aplikasinya*. ESPA4424/Modul 1.
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of Natural Development: A Description and the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, Vol 13 (4), Page 1-84.

Zofan, R. R., Wicaksono, A. D., dan Wijayanti, Wawargita Permata. (2023). Prioritas Penanganan Tingkat Kesenjangan Wilayah Antar Kecamatan Di Kabupaten Solok Selatan. J. Plan. Urban Reg. Environ., Vol. 12, [Daring]. Tersedia pada: file:///C:/Users/hp/Downloads/603-1472-1-PB.pdf.

[Home](#) / Editorial Masthead

Editorial Masthead

Journal manager

agungsp agungsp

Beta Asteria

Isty Murdiani

Agung Prasetyo

Arif Suwarjono

Arif Suwarjono
STIE Widya Wiwaha

Journal editor

Lilik Ambarwati
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Lilik Ambarwati
STIE Widyya Wiwaha

Beta Asteria

Khoirunnisa Cahya Firdarini
STIE WIDYA WIWAHA

Abdul Halim

Sugiyarti Fatma Laela
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor

Priyastiwi

Suhartono
STIE Widya Wiwaha

Sulastiningsih Sulastiningsih
STIE Widya Wiwaha

John Suprihanto

Arif Suwarjono
STIE Widya Wiwaha

Editor WW

View [Editorial History](#)

Peer Reviewers in Previous Year

The editors express their appreciation of the reviewers for 2025 listed below.

Icuk Rangga Bawono

Junaidi

masjoen junaidi
Universitas Teknologi Yogyakarta

Yudi Sutarso

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2622-173X



pISSN 0854-4530



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



ACCREDITED SINTA 4



SK Akreditasi Sertifikat

Support By



VISITORS

